

ISSN 1858-1226

JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN

Volume 1, Nomor 1, Juli 2005

Diterbitkan Oleh :

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta

JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN

ISSN 1858-1226

Terbit Dua Kali Setahun Pada Bulan Juli Dan Desember, Berisi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dan Pemikiran Di Bidang Pemberdayaan Sosial, Ekonomi dan Teknik Pertanian Terapan

Ketua penyunting

Thomas Widodo

Penyunting Pelaksana

M. Adlan Larisu

Abdul Hamid

Miftakhul Arifin

Suharno

Mitra Bestari

Masyhuri (Universitas Gadjah Mada)

Aziz Purwanto (Universitas Gadjah Mada)

E. W. Tri Nugroho (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa)

Nani Tri Iswardayati (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang)

Sapto Husodo (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang)

Rajiman (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang)

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Redaksi Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No. 2 Yogyakarta Kode Pos 55167 Telp. 373479 Fax. 375528

JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam penerbitan lain. Naskah diketik atas kertas HVS Kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (pedoman penulisan naskah). Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata penulisan lainnya tanpa merubah esensi naskah.

Dicetak di Percetakan CV. Jayanti, Isi diluar tanggung jawab Percetakan

JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN

Volume I, Nomor I, Juli 2005

ISSN 1858-1226

DAFTAR ISI

Masyarakat Petani di Tengah Arus Globalisasi	1 – 16
Tri Nugroho	
Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan	17 – 32
Subejo dan Supriyanto	
Sikap Petani Terhadap Aktivitas Sektor Usahatani di Kawasan Peri Urban Yogyakarta	33 – 49
Sapto Husodo	
Efisiensi Ekonomi Usahatani Melon di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten	50 – 60
Ananti Yekti	
Dampak Penyimpangan Iklim Terhadap Perubahan Karakteristik Hujan Di Patuk, Gunungkidul	61 – 70
Rajiman	
Pengaruh Blanching Terhadap Laju Pengeringan Dan Kadar Asam Lemak Bebas Kopra	71 – 83
Miftakhul Arifin	

**MASYARAKAT PETANI
DI TENGAH ARUS GLOBALISASI
(*Peasant Community in The Globalization*)**

Tri Nugroho

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

ABSTRACT

Up to the present time, the life of peasant community enjoys not much changes: burdened with poverty, suffers, dependence and frequently be the victim of social injustice. The globalization current is indicated with profit hunting of the capital owners, meanwhile the neglecting of common welfare made their life worsened. It is not surprising when many of them just accept the bad fate, suffering life and impossibility to change. This article studying the characteristics, challenge and the globalization chance tries to seek alternative answers, those are the possibility to change and innovate their life, and accepting the bad fate is not a must.

Key Words: *fate, challenge-chance, globalization, common welfare, civic accountability.*

PENDAHULUAN

Krisis multidimensional yang mendera masyarakat Indonesia sejak tahun 1998 belum juga mampu diatasi hingga kini. Jumlah anggota masyarakat petani yang kelaparan, busung lapar, terkena penyakit (berat dan ringan), ter-PHK, tidak mampu menyekolahkan anak, putus asa, dan semakin miskin dan lemah (=semakin bergantung) terus bertambah. Anggota masyarakat petani yang meninggal akibat semua

hal tersebut juga semakin tak terhitung.

Sementara itu, masyarakat petani yang masih mau berjuang hidup selalu berada dalam posisi lemah. Di saat musim tanam, harga-harga benih, pupuk dan obat-obatan melambung tinggi. Di saat musim panen, harga jual hasil pertanian merosot tajam. Akibatnya, mereka nyaris tidak mendapatkan keuntungan yang berarti untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hasil panen cukup untuk hidup saja sudah bagus.

Tenaga yang telah dikeluarkan oleh masyarakat petani seolah tidak berharga. Jika mereka menginginkan harga yang baik, mereka harus dapat menahan hasil penenannya selama beberapa bulan di gudang. Persoalannya adalah mereka tidak memiliki sarana dan prasarana yang baik untuk menyimpan hasil penenannya. Akibatnya, mereka harus selalu menjual hasil panen segera setelah panen. Harga hasil panen yang dijual di saat barang melimpah tentunya akan rendah. Apa boleh buat. Ini lah kenyataan hidup masyarakat petani. Mereka selalu saja tidak dapat memilih. Sementara itu, kehidupan para kaki tangan para pemilik modal (uang), seperti: “tengkulak”, pengepul, pedagang, calo, pemilik alat transportasi hasil pertanian, pemilik gudang, seringkali jauh lebih baik.

Kondisi hidup masyarakat petani seperti itu telah berlangsung lama. Meski zaman telah berganti, dari orde lama, ke orde baru dan

kini orde reformasi, meski pimpinan negara datang silih berganti, meski berbagai kebijakan telah diperbaharui, ternyata kehidupan masyarakat petani tidak banyak berubah. Kehidupan mereka masih sarat dengan kemiskinan, penderitaan dan ketergantungan. Di era globalisasi, yang ditandai dengan pasar bebas, kehidupan masyarakat petani justru semakin terpuruk. Membanjirnya gula, beras, buah-buah import yang jauh lebih murah, misalnya, menyebabkan kehidupan masyarakat petani semakin terpuruk. Apakah ini nasib masyarakat petani di tengah arus globalisasi? Apakah nasib itu harus mereka terima sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah? Itu lah masalahnya. Untuk menjawab permasalahan itu, pertama, akan dipelajari tantangan-tantangan riil yang dihadapi masyarakat petani. Kedua, akan dipelajari peluang dan harapan baru yang muncul dalam arus globalisasi, sehingga dari titik peluang ini

masyarakat petani dapat memperbaharui kehidupan mereka.

TANTANGAN GLOBALISASI

Arus globalisasi sesungguhnya merupakan arus pemikiran Neoliberalisme (Robert Gilpin, 2001: 309-316). Dalam pandangan Neoliberalisme manusia pertamanya dan terutama dilihat sebagai manusia ekonomi (*homo economicus*), artinya cara-cara manusia bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai bentuk hubungan antar manusia, melainkan satu-satunya model yang mendasari semua tindakan dan relasi antar manusia. Tindakan dan hubungan antar pribadi manusia maupun tindakan dan hubungan sosial atau politis hanyalah ungkapan dari model hubungan menurut kalkulasi untung-rugi individual yang berlangsung dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, pertama, relasi antar pribadi serta hubungan-hubungan lain mesti dipahami dengan

memakai konsep dan tolok ukur ekonomi sistem pasar. Jadi “adanya” manusia sebagai manusia ekonomi mempunyai implikasi pada cara pandang *economicus* pula. Kedua, prinsip ekonomi sistem pasar juga digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi berbagai langkah individu atau kebijakan pemerintah suatu negara. Keberadaan manusia dan cara pandangnya yang ekonomis itu kemudian melahirkan etika *economicus*. (B. Herry Priyono, 2003a: 47-84) Norma atau ukuran yang akan digunakan untuk menilai individu atau kebijakan-kebijakan pemerintah adalah sistem pasar bebas.

Penekanan manusia sebagai makhluk ekonomi yang sangat individual secara perlahan mengesampingkan kesejahteraan bersama dan menggantinya dengan akumulasi kekayaan individual (Bdk. Davis P. Levine, 2001). Di sini terjadi pengusuran arena hidup sosial dengan urusan individual. Sebagai contoh dapat dikemukakan

kecenderungan berikut: Dalam ekonomi politik klasik, tanah, modal (uang), dan tenaga kerja terkait secara intrinsik dan disebut dengan istilah '*trias economica*' (tanah, modal, tenaga kerja). Ekonomi neoliberal justru ingin memisahkan modal dan tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam gagasan neoliberal, misalnya, orang-orang yang diupah itu bukanlah buruh atau pegawai yang tergantung pada perusahaan (atau badan usaha, yang memiliki modal), melainkan para wirausahawan/ti bebas yang bertanggungjawab atas keputusan dan perkembangannya sendiri, dan yang (sama seperti para kapitalis) berusaha memproduksi nilai surplus bagi dirinya sendiri. Mereka (entah buruh, manager, direktur, ataupun guru) adalah para wirausahawan bebas. Masing-masing individu adalah orang swasta (B. Herry Priyono, 2003b: 135-136). Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini adalah kecenderungan pertama.

Kecenderungan kedua adalah melepaskan modal dari kaitannya dengan tanah, dan tenaga kerja, yang kemudian diistilahkan 'deregulasi' dan 'liberalisasi'. Modal juga di-privat-kan sampai ke titik dimana modal semakin kehilangan dimensi komunitasnya, yang kemudian diistilahkan privatisasi (Alasdair MacIntyre, 1981: 236). Jadi, personalisasi dan de-personalisasi modal dilakukan secara serentak. Ekonomi politik neoliberal secara mendasar melepas etika-sosial yang melekat pada modal dari tata '*trias economica*' dalam gagasan ekonomi politik klasik.

Melepaskan kinerja modal finansial dari kaitannya dengan tanah (makro: patria) dan tenaga kerja (makro: citizen) berarti melepaskan kinerja modal dengan proses *survival* warga suatu komunitas politik-kultural. Jika terkait, kaitan itu sesungguhnya merupakan sebuah konsekwensi yang tak diinginkan. Dilepaskannya

modal dari tata *trias economica* itu juga berarti pemberian gratis hak istimewa dan kekuasaan yang begitu besar kepada (para pemilik) modal finansial (Lih. Fred Block, 1992: 277-303). Tentu, kekuasaan sebesar itu tidak jatuh dari langit. Kekuasaan itu berasal dari rentetan proyek untuk melepaskan uang dari kekangan waktu, ruang, regulasi, dan tujuan-tujuan lain yang menghambat akumulasi. Singkatnya, kebebasan gerak modal finansial bagi akumulasi laba (George Soros, 2002: 3). Akan tetapi, tekanan tidak terletak pada nilai 'kebebasan' yang bernilai pada dirinya, tetapi kebebasan untuk mengakumulasi laba. George Soros menyatakan: "Inilah akar kekacauan dari corak globalisasi ini: pemburuan laba privat tanpa kendali diandaikan akan mengabdikan kebaikan bersama ...". (George Soros, 2002: 164). Joseph Stiglitz, penerima Nobel Ekonomi 2001 menyatakan juga: "[yang dikejar adalah] kepentingan pada pemilik modal

finansial; bukan lagi kepentingan ekonomi global tetapi kepentingan para tuan finansial global" (Joseph Stiglitz, 2002: 206.207). Dan Stiglitz tidak segan menunjuk siapa pelakunya, yaitu para pialang pasar uang (seperti Wall Street (Joseph Stiglitz, 2002: 207). Pasar uang yang ditunjuk Stiglitz itu bukan terutama berisi transaksi modal untuk industri, melainkan spekulasi (B. Herry Priyono, 2003b: 136-137). Dengan demikian kekuasaan uang semakin dilepaskan dari kaitan intrinsiknya dengan proses *survival-material* sebagian terbesar warga dunia yang tidak punya aset finansial. Uang semakin bebas mengendalikan jalannya sejarah.

Corak globalisasi seperti itulah yang sedang terjadi dewasa ini. Pada tataran paling abstrak, globalisasi menyangkut pencabutan waktu dari ruang. Anthony Giddens menamakan gejala itu sebagai "penjarakan waktu-ruang", sedang David Harvey menyebutnya 'pemadatan waktu-ruang', (Anthony

Giddens, 1990: 64; David Harvey, 1990: bab 16&17). Dahulu kala transaksi jual-beli suatu barang menuntut temu muka penjual dan pembeli. Peristiwa itu hanya mungkin terjadi dengan pertemuan keduanya pada titik waktu dan tempat yang sama (kesatuan waktu-ruang). Sekarang, transaksi itu dapat dilakukan pada titik waktu yang sama melalui telepon/faksimile/e-mail, meski dilakukan oleh dua pihak dari tempat yang berbeda. Terbentangleh proses itu pada lingkup global, dan kita akan menemukan gejala globalisasi (ekonomi).

Sedangkan pada medan empirik, globalisasi berisi proses kaitan yang semakin erat dari hampir semua aspek kehidupan, suatu gejala yang muncul dari interaksi yang semakin intensif dalam perdagangan, transaksi finansial, media, transportasi dan teknologi (Howard White, 2001: 549-569; George Soros, 2002: 1). Benar, bahwa globalisasi tidak hanya

menyangkut aspek ekonomi, tapi juga kultural, sosial dan politis, namun aspek-aspek kultural-sosial-politis itu mensyaratkan kinerja modal finansial yang, lolos dari kaitannya dengan *patria* dan tenaga kerja. Perkawinan dari berbagai praktik yang mengglobal tersebut melahirkan cara-pandang baru pula. Artinya, globalisasi bukan hanya berupa kaitan integral antara berbagai tindakan kita (misal: transaksi finansial), tetapi juga cara baru memandang persoalan. Artinya, seluruh dunia merupakan unit tindakan dan pemikiran (B. Herry Priyono, 2003b: 137-138). Dengan demikian dinamika tindakan serta pemikiran manusia juga tidak lagi hanya berlangsung pada lingkup desa, suku, kota, provinsi ataupun negara-bangsa, melainkan terentang pada lingkup global.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa tantangan konkret yang akan dihadapi oleh masyarakat petani di era globalisasi ini. **Pertama**, tidak

mudah bagi petani untuk melihat dirinya dan manusia lain hanya dari sisi ekonomi, sisi untung-rugi. Petani telah terbiasa melihat manusia sebagai yang berharga pada dirinya, terlepas dari kenyataan apakah ia mendatangkan untung atau tidak. Cara pandang berdasarkan untung-rugi akan mengakibatkan yang lemah, miskin, sakit, dan gagal akan tersingkir dari pergaulan masyarakat petani. **Kedua**, dalam pemikiran Neoliberalisme kesejahteraan bersama dikesampingkan dan diganti dengan akumulasi laba individual (pemilik modal) Ini merupakan tantangan berat untuk masyarakat petani, sebab di dalam masyarakat petani kenyataannya terbalik, yaitu menomor-duakan kepentingan (keuntungan) diri dan mengedepankan kesejahteraan bersama. Pembalikan pemikiran seperti itu dapat meretakan ikatan kebersamaan, kerukunan, dan mengedepankan sikap individualistik di kalangan masyarakat petani. Keretakan dan sikap individualistik

seperti itu justru akan memperlemah posisi petani di hadapan kekuasaan (politik, sosial, ekonomi, dan budaya). **Ketiga**, pemikiran Neoliberalisme melepaskan modal dari kaitannya dengan tanah, dan tenaga kerja, yang kemudian diistilahkan 'deregulasi' dan 'liberalisasi'. Modal juga di-privat-kan sampai ke titik dimana modal semakin kehilangan dimensi komunitasnya, yang kemudian diistilahkan privatisasi. Jadi, personalisasi dan de-personalisasi modal dilakukan secara serentak. Ekonomi politik neoliberal secara mendasar melepas etika-sosial yang melekat pada modal dari tata '*trias economica*'. Pemikiran tersebut tidak dikenal dalam masyarakat petani. Masyarakat petani senantiasa memahami modal, tanah dan tenaga kerja dalam satu kesatuan yang terjalin erat. Oleh sebab itu masyarakat petani telah terbiasa dengan perjuangan mewujudkan kesejahteraan bersama dan masuk dalam ikatan pribadi yang saling mendukung,

menolong dan berbela rasa. Ikatan pribadi antar warga masyarakat petani memang tidak selalu memberikan keuntungan ekonomis (bahkan seringkali merugikan secara ekonomis), namun bagi masyarakat petani keuntungan ekonomis bukanlah satu-satunya yang ingin diraih dalam hidup mereka. Etika sosial masyarakat petani pun tidak mendasarkan diri pada untung-rugi, tetapi kebersamaan, keselarasan, keserasian, keharmonisan, keseimbangan. Norma-norma tersebut justru banyak menyelamatkan kehidupan anggota masyarakat petani yang miskin, terpinggir dan lemah, sebab meski mereka ini tidak menguntungkan, namun kerinduan masyarakat petani untuk “bersama” membuat yang miskin, lemah dan terpinggir tetap berada dalam rangkaian, perhatian dan pertolongan masyarakat petani pada umumnya. Etika sosial Neoliberalisme benar-benar merupakan tantangan berat bagi kehidupan anggota masyarakat petani yang miskin, lemah dan

terpinggir. **Keempat**, dalam pemikiran Neoliberalisme, manusia dengan modal yang besar ingin menguasai kekuasaan yang dapat menentukan jalannya sejarah. Bahwa petani sekarang ini tidak dapat menentukan harga dan tidak dapat memilih pembeli, ini adalah bukti dari ambisi para pemilik modal dalam menentukan sejarah hidup. Arah sejarah telah di tangan mereka dan untuk mereka. Kenyataan ini juga menjelaskan mengapa “kaki tangan pemilik modal dan pengumpul laba” seringkali jauh lebih kehidupannya daripada petani yang memiliki sawah, kepandaian dan ketrampilan, menanam, merawat serta memanen dalam terpaan hujan dan panas. Sejarah hidup masyarakat petani sedikit banyak telah berada di tangan pemilik modal.

PELUANG DI ERA GLOBALISASI

Tantangan-tantangan tersebut bukanlah satu-satunya isi arus

globalisasi. Di dalam arus itu juga terdapat peluang dan harapan baru bagi masyarakat petani. Peluang dan harapan muncul dari kenyataan sejarah bahwa sekuat apapun arus globalisasi itu, jika kinerja ekonomi dilepas dari proses perjuangan begitu banyak warga sebuah komunitas politik rupanya tidak akan bertahan lama. Karl Polanyi, sebagaimana dijelaskan oleh B. Herry Priyono, menyatakan bahwa setiap kali kinerja ekonomi dilepas dari kaitannya dengan pilar-pilar lain yang menyangga hidup bersama, setiap kali itu pula terjadi apa yang ia sebut '*double movement*'. Maksudnya, semakin kinerja modal finansial dilepas dari kaitannya dengan tanah (*patria*) dan tenaga kerja, semakin akan berkembang gerakan untuk membawa kembali kinerja modal itu ke dalam pangkuan tanah, modal dan tenaga kerja (*trias economica*). Dalam bidang ekonomi-politik, sekuensi peristiwa deregulasi di awal dekade 1980-an, *boom* finansial perluasan

ekonomi maya, krisis ekonomi sejak tahun 1997, kerontokan harga saham, gerakan kritik terhadap globalisasi, terbongkarnya berbagai skandal bisnis mulai tahun 2002, dan lalu reformasi regulasi, merupakan contoh *double movement* itu (B. Herry Priyono, 2003b: 139). Dalam arti ini sebagian besar gerakan kritik terhadap globalisasi bukanlah gerakan anti-modal dan anti-globalisasi, melainkan gerakan mengembalikan kinerja modal supaya terkait kembali dengan proses perjuangan tenaga kerja dan tanah (tanah air=*patria*).

Selain itu, dari banyak gejala (misalnya, menjamurnya kelompok-kelompok kedaerahan, kesukuan, trah, dan klan yang makin meluas diantara kaum elite di kota-kota besar) juga semakin jelas bahwa manusia tanpa partikularitas kultur dan emosi adalah ilusi. Dari gejala itu dapat dikatakan bahwa semakin global gerak hidup manusia, semakin intensif pula pencarian identitas lokal manusia itu. Paradoks

ini bukan sebetuk irrasionalitas, melainkan manifestasi dari keutamaan manusia yang dikaruniai transendensi universalitas dan sekaligus kerinduan partikularitas. Rupanya, itulah juga mengapa gejala kebangkitan etnis dan nasionalis menguat pada periode sejarah ketika gerak globalisasi juga sedang intensif terjadi (Bdk, misalnya, Anthony Giddens, 1998: 31-32; Anthony Giddens, 1990: 64-65). Tentu dengan itu tidak mau dibenarkan bentuk-bentuk kebangkitan gerakan etnis atau nasionalis dalam rupa rasisme (B. Herry Priyono, 2003b: 140)

Paradoks mengglobal dan melokal, pada akhirnya, adalah tegangan hidup sehari-hari dalam kondisi modernitas. Mengelak dari tegangan itu sama dengan membekukan waktu, atau menghentikan sejarah. Hasilnya adalah fundamentalisme yang menuntut kejelasan (contra globalisasi atau pro globalisasi). Tuntutan semacam itu

muncul lantaran 'titik tengah' terasakan sebagai suasana hidup yang membingungkan dan membo-sankan karena tidak punya ketajaman yang menggairahkan. Dalam kenyataannya, sejarah berisi lebih banyak kesemrawutan dan kesimpangsiuran gejala daripada kejelasan. Paradoks mengglobal-melokal itu hanyalah salah satu contoh dari ketidakjelasan yang ada dalam hidup sehari-hari.

Kondisi yang ditandai oleh berbagai paradoks itu bukan sesuatu yang niscaya atau tak-terelakkan. Kondisi tersebut juga bukan gejala tanpa pelaku, melainkan produk dari interaksi, gesekan dan tegangan dari berbagai praktik, tindakan, dan kerinduan yang operasional dalam sejarah moderen. Justru karena kondisi itu bukannya tak terelakkan, dan sesuatu yang bukannya tanpa pelaku, maka terbukalah ruang untuk melakukan transformasi, untuk mengubah nasib masyarakat petani yang seolah tak dapat diubah.

Dari sekian banyak faktor itu, pergeseran praktik ekonomi-politik, yang disangga oleh pemikiran neoliberalisme, merupakan salah satu kunci untuk memahami berbagai tegangan yang berlangsung dewasa ini. Kunci itu tidak hanya kunci untuk memahami apa yang terjadi, tetapi juga kunci untuk mendekati permasalahan. Arah pendekatan yang dibutuhkan adalah gerakan membawa kembali kinerja modal finansial ke dalam kaitan sentralnya dengan proses perjuangan tenaga kerja dan patria (B. Herry Priyono, 2003b: 140-141). Untuk itu perlu diupayakan agar modal dapat dipertanggungjawabkan secara publik (*civic accountability*) dan menghasilkan kebijakan publik dalam arti yang sebenarnya.

Modal, bisnis, dan pasar adalah fakta yang senantiasa hadir dalam hidup ini, dan setiap manusia akan selalu terlibat dengannya. Bila demikian, masalahnya tidak terletak

pada ada/tidaknya modal, bisnis, pasar, tetapi pada akuntabilitasnya.

Perlu disadari bahwa ambivalensi yang terlibat dalam globalisasi dewasa ini mengisyaratkan bahwa globalisasi bisa berwajah “penuh peluang yang memberi harapan” dan sekaligus “tantangan yang menakutkan”. Meskipun globalisasi dapat dilakukan, namun globalisasi adalah kondisi sejarah. Dalam arti ini, pertanyaan apakah kita harus merayakan atau meratapi globalisasi merupakan suatu kekeliruan. Demikian pula, menolak atau menerima globalisasi bukanlah soalnya. Soalnya terletak dalam pokok ini: bagaimana menciptakan berbagai gerakan untuk membuat kekuatan kekuatan yang membuat gobalisasi punya watak seperti sekarang ini menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Inilah upaya yang pertama. Gerakan kritik pada globalisasi perlu menjadi semakin sensitif membedakan “peluang” dan

“tantangan yang menakutkan” dari globalisasi.

Upaya kedua adalah membangkitkan kebijakan publik (public policy) seperti dimaksud dalam istilah itu sendiri. Selama hidup bersama ini diinginkan (yang terungkap dalam istilah seperti “umum”, “publik”), selama itu pula dibutuhkan keberadaan “badan publik” (public agency). Kelemahan fatal yang terjadi dewasa ini ialah, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh badan publik semakin kehilangan ciri publik-nya, karena semakin sering menjadi sekedar pelaksanaan dari kemauan/tuntutan para pelaku dominan (Joseph Stiglitz, 2002: 60,61), yaitu para pemilik atau pengontrol aset finansial. Itulah gejala yang oleh Joel Hellman dan kawan-kawan disebut *state capture*, di mana kapasitas legitim suatu ‘badan publik’ menjadi tawanan para pemilik/pengontrol modal finansial (Joel Hellman et al., 2000: 4,6). Singkatnya, kebijakán publik

sekedar menjadi ungkapan dan apa yang dikehendaki kelompok-kelompok finansial itu. Gejala ini punya implikasi jauh. Kebijakan publik semakin tidak lagi digerakkan oleh agenda intensional untuk melaksanakan kepentingan publik. Kepentingan publik/umum/bersama semakin menjadi sekedar akibat sampingan dari kebijakan-kebijakan yang terutama mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan kelompok finansial tersebut. Jika melalui berbagai kebijakan neo-liberal, kesejahteraan bersama terlaksana, syukurlah. Bila tidak terjadi, juga tidak apa-apa karena kesejahteraan bersama itu tidak pernah menjadi tujuan awalnya. Itu sebabnya mengapa perkara demokrasi dan hak-hak asasi lalu sering dianggap tidak relevan. Dengan kata lain, kesejahteraan bersama (ekonomis, kultural, politis) semakin menjadi sekedar remah-remah yang jatuh dari meja pesta para tuan besar (Joseph Stiglitz, 2002:79-80). Dengan itu, kebijakan publik juga

semakin kehilangan alasan adanya, karena ia bukan lagi 'kebijakan', dan bukan juga dilakukan bagi 'publik'. Dalam kondisi itu, membangkitkan (menghasilkan) kebijakan publik berarti memasukkan kembali tujuan "kepentingan bersama" ke dalam berbagai kebijakan, baik itu kebijakan di bidang pertanian, pendidikan, hukum, ekonomi, politik, kebudayaan, dsb. (B. Herry Priyono, 2003b: 141-142) Kebijakan publik juga harus dibangkitkan dalam kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat petani. Kebijakan publik itu harus bertujuan memasukkan nilai-nilai humanisme universal dan mampu mendefinisikan ulang makna hidup bersama dalam masyarakat petani pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat petani yang penuh tantangan di tengah arus globalisasi ini, sesungguhnya bukanlah nasib yang tidak dapat diubah. Hal ini

karena (1) globalisasi tidak hanya membawa tantangan yang berat dan menakutkan tetapi juga peluang yang memberi harapan. Pada kutub "peluang" inilah, sebenarnya hidup masyarakat petani dapat diubah, dan tidak harus diterima sebagai nasib yang tak dapat diubah; (2) semakin kinerja modal finansial dilepas dari kaitannya dengan tanah (*patria*) dan tenaga kerja, semakin akan berkembang gerakan untuk membawa kembali kinerja modal itu ke dalam pangkuan *trias economica*; (3) semakin global gerak hidup manusia, semakin intensif pula pencarian identitas lokal manusia itu. Di tengah tren pencarian buah-buah, gula, beras import, serta obat-obatan bermerek oleh kalangan tertentu, gencar pula pencarian buah-buah, beras dan ramuan obat tradisional dari tanaman lokal; (4) paradoks mengglobal dan melokal adalah tegangan hidup sehari-hari dalam kondisi modernitas. Ini berarti masyarakat petani tak dapat melarikan diri dan harus mampu

mensiasati kondisi yang paradoksal ini untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan mereka (5) kondisi yang ditandai dengan berbagai paradoks itu dapat dipahami sebagai bukan tak terelakkan, dan sebagai sesuatu yang bukannya tanpa pelaku, sehingga terbukalah ruang untuk melakukan pembaharuan, mengubah “nasib yang harus diterima” menjadi “nasib yang dapat diubah”. Ini berarti, supaya nasib hidup masyarakat petani dapat diubah atau diperbaharui, perlu diciptakan berbagai gerakan untuk membuat kekuatan kekuatan yang membuat gobalisasi punya watak seperti sekarang ini menjadi lebih akuntabel. Selain itu perlu dibangkitkan kebijakan publik, artinya memasukkan kembali tujuan kepentingan bersama ke dalam berbagai kebijakan. Di dalam kebijakan itu perlu dimasukkan tujuan kesejahteraan bersama, nilai-nilai kemanusiaan universal dan mendefinisikan ulang makna hidup bersama.

PENUTUP

Tak dapat diungkiri bahwa kehidupan masyarakat petani yang sarat dengan kemiskinan, penderitaan dan ketergantungan selama bertahun-tahun dapat menyebabkan masyarakat petani memandang kehidupan itu sebagai sebuah nasib yang harus diterima begitu saja dan tidak dapat diubah. Kegagalan, kekecewaan, kesendirian, dan perlakuan tidak adil dapat semakin mempertebal keyakinan itu.

Arus globalisasi yang sedang melanda zaman ini memuat banyak tantangan yang dapat menguatkan keyakinan bahwa hidup adalah suatu nasib yang harus diterima. Tantangan-tantangan itu juga dapat melemahkan posisi tawar dan memperburuk hidup bersama masyarakat petani. Tantangan-tantangan tersebut, antara lain, (1) sikap yang mengutamakan keuntungan dalam memandang manusia, (2) mengesampingkan tujuan kesejahteraan bersama dan mengedepankan akumulasi modal,

(3) memisahkan modal dari tenaga kerja dan tanah yang berakibat modal semakin bebas menguasai sejarah hidup banyak orang, termasuk petani. Menghadapi berbagai tantangan itu, diperlukan upaya mengubah tantangan menjadi peluang. Caranya antara lain, memperkuat keyakinan, nilai dan sikap hidup yang selama ini terbukti efektif dalam mengatasi berbagai tantangan dan menyuburkan kebersamaan. Misalnya (1) sikap yang melihat manusia sebagai yang berharga pada dirinya, terlepas dari kenyataan apakah ia mendatangkan untung atau tidak, (2) sikap menomor-duakan kepentingan (keuntungan) diri dan mengedepankan kesejahteraan bersama, (3) sikap yang senantiasa memahami modal, tanah dan tenaga kerja dalam satu kesatuan yang terjalin erat, (4) etika sosial masyarakat petani yang mendasarkan diri pada kebersamaan, keselarasan, keserasian, keharmonisan, keseimbangan. Dengan sikap-sikap tersebut, kekuatan para

pemilik modal dapat lebih diarahkan bagi terwujudnya kesejahteraan bersama, sehingga hidup masyarakat petani dapat diperbaiki.

Kemungkinan masyarakat petani untuk mengubah nasib hidupnya semakin besar lagi ketika melihat kenyataan bahwa arus globalisasi tidak hanya membawa tantangan yang menakutkan tetapi juga peluang dan harapan baru. Pertama, peluang dan harapan itu muncul dari kenyataan bahwa gerak mengglobal itu selalu disertai gerak melokal. Tren dan kecintaan pada hasil-hasil pertanian import, senantiasa dibarengi dengan gerak cinta pada hasil-hasil pertanian lokal. Bahkan hasil pertanian lokal terpacu untuk menaikkan mutu sehingga mampu memasuki pasar internasional. Kedua, peluang untuk lebih memperkuat dan mengefektifkan kebijakan publik dan akuntabilitas publik, sehingga kekuatan modal lebih dapat diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, meredefinisi makna kebersa-

maan, dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, kehidupan masyarakat petani yang sarat dengan kemiskinan, penderitaan dan ketergantungan segera dapat diperbaharui dan tidak harus diyakini sebagai sebuah nasib yang harus diterima begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Block, Fred. 1992. *“Capitalism without Class Power”*. *Politics and Society* 20/3.
- Giddens, Anthony. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- . 1998. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Harvey, David. 1990. *The Condition of Postmodernity*. Oxford: Blackwell.
- Hellman, Joel *et al.* 2000. *Measuring Governance Corruption and State Capture*. World Bank Working Paper # 1312, April.
- Herry-Priyono, B. 2002. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . 2003a. *Relasi Kota-Desa dalam Globalisasi Dewasa ini*. Makalah disampaikan pada Seminar “Membedah Permasalahan Distorsi Kota-Desa”, BAPPENAS, Jakarta, 14 Februari.
- . 2003b. “*Bangsa dalam Tegangan Lokal-Global*”, dalam Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi, STF Driyarkara-Jakarta, Vol. 2, No, 2, Oktober.
- Levine, David P. 2001. ‘*Political Economy and the Idea of Development*’. Review of Political Economy 13/4.
- MacIntyre, Alasdair. 1981. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. London: Duckworth.
- Soros, George. 2002. *On Globalization*. New York: Public Affairs.
- Stiglitz, Joseph. 2002. *Globalization and Its Discontents*. New York: WW. Norton.
- White, Howard. 2000. “*Pro-Poor Growth in a Globalized Economy*”, Journal of International Development 1, 549-569.

**INDEKS PENGARANG
ILMU-ILMU PERTANIAN 2005**

A Upaya Mengurangi Kemiskinan dengan Pembinaan Lumbung Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Alia Bihrajihant Raya dan Sri Peni Wastutiningsih Efisiensi Ekonomi Usahatani Melon di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Ananti Yekti
B Kemampuan Pertumbuhan Berat Badan Ternak Domba dengan Pemberian Pakan Jerami Padi dengan Perlakuan Natrium Hidroksida (NaOH) sebagai Pengganti Hijauan Bharoto
G Persepsi Petani terhadap Pengembangan Kedelai Hitam di Playen Gunungkidul Gunawan Yulianto
M Pengaruh Blanching Terhadap Laju Pengeringan Dan Kadar Asam Lemak Bebas Kopra Miftakhul Arifin Peranan Pemuka Pendapat dalam Adopsi Inovasi Teknologi Baru pada Petani di Kabupaten Kulon Progo M. Adlan Larisu Pemberitaan Pertanian oleh Surat Kabar Daerah: - Studi Kasus pada Rubrik Kanda Raha- harja SKH. Kedaulatan Rakyat - Muh. Syaiful Ngatif, Harsoyo dan Subejo
R Dampak Penyimpangan Iklim Terhadap Perubahan Karakteristik Hujan Di Patuk, Gunungkidul Rajiman

S

Sikap Petani Terhadap Aktivitas Sektor Usahatani di Kawasan Peri Urban Yogyakarta
Sapto Husodo

Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Menuju Pembangunan yang
Berkelanjutan
Subejo dan Supriyanto

Revitalisasi Kelompok Tani sebagai Media Penyuluhan Pertanian Era Globalisasi
Sunarru Samsi Hariadi

Stabilitas Hasil Lima Kultivar Gandum
Suwaibah Ummul Inayah, Aziz Purwantoro dan Supriyanta

T

Masyarakat Petani di Tengah Arus Globalisasi
Tri Nugroho

Z

Pertumbuhan dan Hasil Selada pada Berbagai Kerapatan Jagung dalam Pola
Tumpang Sari
Zulkarnain

**INDEKS KOMULATIF
ILMU-ILMU PERTANIAN 2005**

Masyarakat Petani di Tengah Arus Globalisasi Tri Nugroho	1 — 16
Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan Subejo dan Supriyanto	17 — 32
Sikap Petani Terhadap Aktivitas Sektor Usahatani di Kawasan Peri Urban Yogyakarta Sapto Husodo	33 — 49
Efisiensi Ekonomi Usahatani Melon di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Ananti Yekti	50 — 60
Dampak Penyimpangan Iklim Terhadap Perubahan Karakteristik Hujan Di Patuk, Gunungkidul Rajiman	61 — 70
Pengaruh Blanching Terhadap Laju Pengeringan Dan Kadar Asam Lemak Bebas Kopra Miftakhul Arifin	71 — 82
Revitalisasi Kelompok Tani sebagai Media Penyuluhan Pertanian Era Globalisasi Sunarru Samsi Hariadi	83 — 93
Pertumbuhan dan Hasil Selada pada Berbagai Kerapatan Jagung dalam Pola Tumpang Sari Zulkarnain	94 — 101
Upaya Mengurangi Kemiskinan dengan Pembinaan Lumbung Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Alia Bihrajihant Raya dan Sri Peni Wastutiningsih	102 — 110
Pemberitaan Pertanian oleh Surat Kabar Daerah: - Studi Kasus pada Rubrik Kanda Raharja SKH. Kedaulatan Rakyat - Muh. Syaiful Ngatif, Harsoyo dan Subejo	111 — 124

Kemampuan Pertumbuhan Berat Badan Ternak Domba dengan Pemberian Pakan Jerami Padi dengan Perlakuan Natrium Hidroksida (NaOH) sebagai Pengganti Hijauan Bharoto	125 — 132
Persepsi Petani terhadap Pengembangan Kedelai Hitam di Playen Gunungkidul Gunawan Yulianto	133 — 144
Peranan Pemuka Pendapat dalam Adopsi Inovasi Teknologi Baru pada Petani di Kabupaten Kulon Progo M. Adlan Larisu	145 — 152
Stabilitas Hasil Lima Kultivar Gandum Suwaibah Ummul Inayah, Aziz Purwantoro dan Supriyanta	153 — 160

PEDOMAN PENULISAN NASKAH DALAM JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN

Naskah dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dengan gaya bahasa efektif dan akademis.

Naskah dapat berupa hasil penelitian atau studi pustaka yang diketik komputer (MS-WORD) dengan spasi ganda termasuk abstrak. Panjang tulisan berkisar antara 16 – 20 halaman kuarto.

Grafik dan gambar garis dapat digambar dengan tinta cina atau menggunakan program grafik (komputer). Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan diberi nomor urut sesuai dengan letaknya. Masing-masing gambar diberi keterangan singkat dengan nomor urut yang diletakkan di luar bidang gambar. Gambar dan grafik mohon diletakkan dalam naskah.

Gambar fotografis diutamakan tidak berwarna (hitam putih) dan dicetak diatas kertas mengkilap. Jelas dan tidak kabur.

Nama lain (binomial) diberi garis bawah atau cetak miring.

Naskah hasil penelitian mohon disusun atas bagian-bagian sebagai berikut :

Judul, harus singkat dan menunjukkan identitas subyek, indikasi tujuan studi dan memuat kata-kata kunci. Jumlah kata seyogyanya berkisar antara 6 – 12 buah, dituliskan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Nama atau nama-nama penulis ditulis tanpa gelar.

Abstract (intisari), harus dapat memberi informasi mengenai seluruh isi karangan, ditulis dengan ringkas, padat, jelas dan tidak lebih dari 250 kata, ditulis dalam Bahasa Inggris dan disertai keyword.

Pendahuluan, berisi latar belakang, masalah dan tinjauan teori secara ringkas.

Metode penelitian, berisi penjelasan mengenai bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian (kalau ada), waktu, tem-

pat dan teknik analisis (rencana percobaan).

Hasil dan pembahasan, disajikan secara ringkas (dapat dibantu dengan tabel, grafik atau foto-foto). Pembahasan merupakan tinjauan terhadap hasil penelitian secara singkat tetapi jelas dan merujuk pada literatur terkait.

Kesimpulan dan saran, berisi hasil konkrit ataupun keputusan dari penelitian yang dilakukan dan saran tindakan lanjut untuk bahan pengembangan penelitian berikutnya.

Daftar pustaka, memuat semua pustaka yang digunakan dalam penulisan karangan. Daftar acuan ditulis dalam urutan abjad secara kronologis sebagai berikut :

Untuk buku: nama pokok (keluarga) dan inisial, tahun terbit, judul, jilid, edisi, nama penerbit, tempat terbit.

Untuk karangan dalam buku: nama pokok dan inisial pengarang, tahun, judul karangan, inisial dan nama editor, judul buku, halaman pertama dan akhir karangan, nama penerbit dan tempat terbit.

Redaksi mempunyai hak untuk mengubah dan memperbaiki ejaan, tata tulis dan bahasa yang dimuat tanpa mengubah esensi.

Naskah yang telah ditulis dan sesuai dengan pedoman penulisan jurnal ilmu-ilmu pertanian dikirim paling lambat satu bulan sebelum bulan penerbitan kepada :

M. Adlan Larisu

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No. 2 Yogyakarta Kode Pos 55167 Telp. (0274) 373479 Fax. (0274) 375528. E-Mail : jurnal_stppyogya@yahoo.com